

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

IRWAN
45 09 013 040



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh

IRWAN

45 09 013 040

BOGOWA

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar, Skripsi dengan judul :

"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan"

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda (Alm.), Ibunda tercinta "ISA" yang telah membesarkan, mendidik, mengasahi penulis serta memberi pengorbanan yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi sebagai Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas "45" Makassar. Juga kepada Saudara-saudaraku, para keponakanku yang penulis sayangi (penulis ucapkan terima kasih atas dukungan serta motivasi, sehingga penulis cepat tamat dan cepat pula dapat pekerjaan yang layak serta menjadi awal kesuksesan penulis), Amin.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH., selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Muhlis Ruslan, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Pokok	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan	7
2.1.2 Anggaran Kinerja Dan Analisis Standar Belanja	7
2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9
2.1.4 Akuntansi Keuangan Daerah	10
2.1.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.2 Analisis Rasio	16
2.3 Karangka Pikir	19

2.4 Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	22
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.3.1 Jenis Data	22
3.3.2 Sumber Data.....	23
3.4 Metode Analisis.....	23
3.5 Definisi Operasional.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Makassar.....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Makassar	26
4.1.2 Wilayah Administratif Pemerintahan	30
4.1.3 Pejabat Walikota Makassar Dari Sejak Pemerintahan.... Belanda Sampai Sekarang	31
4.1.4 Visi Dan Misi Pemerintah Kota Makassar	33
4.1.5 Nilai-Nilai	35
4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar	
(Bagian Keuangan)	37
4.1.7 Tugas Dan Fungsi	38
4.2 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar.....	48
4.3 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58

5.1 Kesimpulan	58
4.1 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar.....	
(Bagian Keuangan).....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Prosentase Terhadap Luas Wilayah Menurut.....	
Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2011	30
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan, RW, RT Yang Dimiliki Masing-Masing.....	
Kecamatan	31
Tabel 4.3 Perkembangan APBD Kota Makassar TA 2008-2011.....	51
Tabel 4.4 Biaya, Target Dan Realisasi PAD Kota Makassar TA 2008-2009... .	53
Tabel 4.5 Biaya, Target Dan Realisasi PAD Kota Makassar TA 2010-2011... .	53
Tabel 4.6 Perkembangan Belanja Dan APBD Kota Makassar TA 2008-2011 .	55
Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan APBD Kota Makassar TA 2008-2011	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menuntut pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang didasarkan pada perusahaan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Selain itu, pendekatan lain yang juga digunakan adalah *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya.

Lemahnya perencanaan pengeluaran tersebut akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan unit kerja yang menikmati *overfinancing* masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah. Dalam situasi seperti ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik, sementara dana yang ada dalam anggaran daerah

merupakan dana publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan *entrepreneur* dalam proses pembangunan daerah.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku". Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang

dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tertanggal 22 Oktober 2010 dan mengikuti PSAP yang dicanangkan. Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu: *transparansi*, *akuntabilitas*, dan *partisipatif*.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya *checks and balances* dan mendorong *profesionalisme*. SKPKD adalah sebagai Bendahara Umum Daerah, dengan demikian fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Untuk pembayaran bernilai kecil dengan cepat, dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran, sebagai bendahara. Untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM berada dalam satu kewenangan SKPKD, maka penerbitan SPM dialihkan ke SKPKD.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atau Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang dimaksud disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada DPRD/masyarakat, laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Termasuk pengurusan umum adalah APBD dan inventaris, kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebagai pengurusan khusus. Keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan daerah. Oleh karenanya APBD memiliki posisi strategis dalam reformasi keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Dalam rangka penilaian terhadap manajemen keuangan daerahnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“bagaimana hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan melihat rasio kemandirian, efektivitas, rasio aktivitas dan tingkat pertumbuhan selama tahun 2008-2011”**.

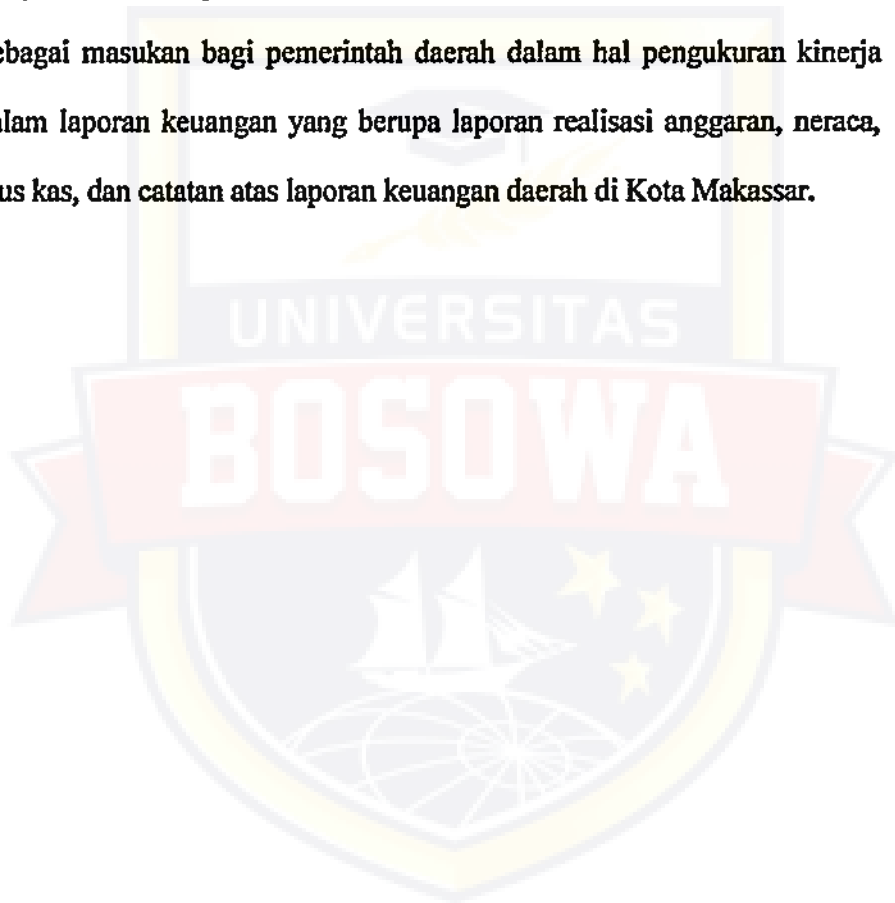
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan metode analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas serta Rasio Pertumbuhan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan di Kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar adalah :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar percaya kepada pemerintahnya khususnya pada pengelolaan keuangan di Kota Makassar
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja keuangan adalah prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut. Kinerja keuangan yang lazim diimplementasikan dalam bentuk rasio-rasio memiliki beberapa kesamaan elemen, karena diturunkan dari komponen-komponen kunci laporan keuangan yang sama.

Menurut Irham Fahmi (2011:2)

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

2.1.2 Anggaran Kinerja dan Analisis Standar Belanja

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Anggaran yang disusun memuat keterangan antara lain :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan

- c. Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Peraturan pemerintah yang menjelaskan pedoman tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu tolak ukur kinerja dan standar biaya yang disebut Analisa Standar Belanja (ASB) atau *Standart Spending Assessment (SSA)* sebagai dasar penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan pemerintah daerah. Kemungkinan seperti ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Adapun tujuan dari Analisa Standar Belanja (ASB) menurut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:31) adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas APBD, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan
- b. Mencegah terjadinya duplikasi dan/atau tumpang tindih antara kegiatan dengan anggaran belanjanya pada masing-masing unit kerja
- c. Menjamin keseriusan antara kegiatan dan anggaran dengan arah kebijakan, strategi dan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non-investasi
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Manfaat dari Analisa Standar Belanja (ASB) menurut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:32) adalah :

- a. Pemerintah daerah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya
- b. Pemerintah daerah dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran
- c. Menghindari tumpang tindih antara pengeluaran rutin dan pembangunan
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas
- e. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan kepada pengertian di atas maka semua instansi Pemerintah, Badan, dan Lembaga Negara, di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitasnya yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan antara lain :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator, perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran data dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

2.1.4 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah menurut Muindro Renyowijoyo (2013:115), bahwa "Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang di pakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk bidang keuangan telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Komponen laporan keuangan sektor publik, khususnya laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut standar akuntansi pemerintah berdasarkan PPRI Nomor 71 Tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua 01 dalam paragraf 14 Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2012:48-66) adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrua, namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan dengan menggunakan basis kas (PSAP BA 02 paragraf 03 dan 04).

Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, Pembiayaan serta Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Masing-masing dari struktur Laporan Realisasi Anggaran tersebut didefinisikan dalam PSAP BA 02 paragraf 07 sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran

- bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Surplus/defisit-LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.
 - e. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaram pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - f. SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2. Neraca.

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. PSAP BA 01 paragraf 8, mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas (PSAP BA 01 paragraf 84 dan 85).

3. Laporan Arus Kas

Laporan keuangan berikutnya yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal adalah laporan arus kas (PSAP BA 03).

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara/daerah.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyediakan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2 Analisis Rasio.

Menurut Sahrul Hi. Posi (Kutipan Skripsi Akuntansi Sektor Publik 2011:24) Analisa rasio harus memperlihatkan hubungan matematis diantara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. hubungan ini di nyatakan dalam persentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Agar memberikan hasil yang optimal, maka penafsiran rasio-rasio haruslah meliputi pengkajian data yang mendasarinya. Rasio yang merupakan pedoman yang bermanfaat dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan-perusahaan lain. Tujuan pokok rasio-rasio ini adalah menyoroti bidang-bidang yang memerlukan investigasi lebih dalam. Pengembangan rasio keuangan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan informasi para pemakai laporan keuangan, karena bentuk rasio keuangan sangat beragam tergantung aspek yang ingin diketahui dan diukur.

Banyak rasio yang terstandarisasi, rasio tersebut adalah diakui sebagai indikator yang bermanfaat sebagai kinerja keuangan dan dihitung secara rutin serta dipublikasikan berdasarkan keuangan atau industri perusahaan-perusahaan analisis keuangan. Rasio tersebut menjadi tolak ukur terhadap hasil-hasil operasi organisasi dibandingkan pada saat mengevaluasi kinerja.

Untuk lembaga pemerintah, rasio-rasio yang digunakan dijelaskan oleh Abdul Halim (2007 : 232-241) sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) adalah analisa rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayaa pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat

yang semakin tinggi. Kinerja pemerintah dalam menjalankan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dari 1 (satu) atau kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio ini berarti kinerja pemerintah semakin baik.

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai dapat mencapai minimal satu atau 100 persen. Adapun formula untuk rasio efektivitas di atas adalah :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Adapun formulanya adalah :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (periode sebelumnya)}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang digunakan dalam penyusunan proposal ini dapat dikemukakan dalam bentuk gambar berikut ini :

Gambar 2.1

KERANGKA PIKIR



2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok diatas, maka dugaan sementara adalah :

"Diduga bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas serta pertumbuhan selama periode 2008-2011 belum optimal".



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama \pm 2 bulan yaitu di bulan Maret sampai dengan April 2013.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan membaca buku-buku literatur serta bacaan lainnya yang relevan dengan masalah tersebut.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian maka penulis melakukan pengamatan dan pengkajian secara langsung ke Kantor Pemerintah Kota Makassar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Data Kuantitatif, berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah, dokumen-dokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data kualitatif, berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses pengamatan dan wawancara langsung dilapangan
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan melihat informasi berupa data, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penulisan ini.

3.4 Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio keuangan (Abdul Halim, 2007:232-241) yaitu :

1. Rasio Kemandirian

Kemampuan kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun formula yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai dapat mencapai minimal satu atau 100 persen. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik.

Adapun formula untuk rasio efektivitas adalah :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Relalisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan dananya pada belanja rutin secara optimal. Adapun formulanya adalah :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (periode sebelumnya)}} \times 100\%$$

3.5 Definisi Operasional

Adapun batasan operasional dalam penulisan ini adalah :

1. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan (dalam hal penulisan ini ialah pemerintahan daerah) telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
2. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang di pakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Unsur-unsur laporan keuangan pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan/pemerintahan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.
5. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas serta Rasio Pertumbuhan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Makassar

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Makassar

Awal Kota dan bandar makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian utara, Pemerintahan Kerajaan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan

Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makassar meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil lainnya, para ningrat Makassar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-lawannya itu, akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru itu.

Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil-alih oleh

Kompeni Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang Portugis ikut berpindah ke Makassar.

Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I-Mangngarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (memerintah 1593-1639), dan dengan Mangkubumi I- Mallingkaang Daeng.

Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 Nopember 1607, tepatnya hari Jum'at, diadakanlah sembahyang Jum'at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo telah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati

sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April.

Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dan secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional. Disamping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara, kota Makassar bukan hanya sebagai pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tetapi merupakan ruang keluarga ("*Living Room*") yaitu sebagai tempat yang aman tenteram, damai sangat kondusif sebagai tempat tinggal dan berinvestasi serta melakukan berbagai aktivitas.

Disamping memiliki keunggulan tersebut, Kota Makassar dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, budaya, memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada empat etnis besar yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, disamping etnis-etnis lainnya; Cina, India, Arab dan Melayu.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan pembangunan, seluruh kemampuan dipadukan secara bijak antara potensi sumber daya alam yang strategi dengan potensi sumber daya manusia yang terbekali dengan nilai-nilai luhur. Pengembangan potensi harus direncanakan sebaik

mungkin dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin melalui aspek yang saling terkait, saling mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Wilayah Administratif Pemerintahan

Luas Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 KM² yang secara administratif Pemerintah Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan, dengan rincian luas masing-masing kecamatan yang dibandingkan dengan prosentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Prosentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Kota Makassar
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mariso	182.000	1,02
2	Mamajang	542.000	3,07
3	Tamalate	1.997.000	11,34
4	Rappocini	947.000	5,37
5	Makassar	251.000	1,41
6	Ujung Pandang	263.000	1,49
7	Wajo	199.000	1,12
8	Bontoala	209.000	1,17
9	Ujung Tanah	593.000	3,36
10	Tallo	583.000	3,30
11	Panakukang	1.686.000	9,58
12	Manggala	2.433.000	13,83
13	Biringkanaya	4.654.000	26,46
14	Tamalanrea	3.352.000	19,06
	JUMLAH	17.577.000	100,00

Sumber Data: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Tahun 2011

Tabel 4.2

Adapun jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang dimiliki masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kode Wil.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	Mariso	9	47	217
020	Mamajang	13	56	283
030	Tamalate	10	108	533
031	Rappocini	10	104	555
040	Makassar	14	69	369
050	Ujung Pandang	10	37	139
060	Wajo	8	45	165
070	Bontoala	12	57	257
080	Ujung Tanah	12	50	198
090	Tallo	15	77	455
100	Panakkukang	11	91	470
101	Manggala	6	65	350
110	Biringkanaya	7	101	499
111	Tamalanrea	6	67	337
	JUMLAH	143	974	4.827

Sumber Data: BPS Kota Makassar Tahun 2011

4.1.3 Pejabat walikota Kota Makassar dari sejak Pemerintahan Belanda

sampai sekarang :

Pemerintahan Kolonial Belanda

1. J.E. Dambrink (1918-1927)
2. J.H.De Groot (1927-1931)
3. G.H.J. Beikenkamp (1931-1932)
4. Ir. F.C.Van Lier (1932-1933)

5. Ch.H.Ter Laag (1933-1934)

6. J.Leewis (1934-1936)

7. H.F.Brune (1936-1942)

Pemerintahan Jepang

1. Yamasaki (1942-1945)

Pemerintahan NICA

1. H.F. Brune (1945)

2. D.M. Van Zwieten (1945-1946)

Pemerintahan R.I.S

1. J. M Qaimuddin (1950-1951)

2. J. Mewengkang (1951)

Pemerintahan Republik Indonesia

1. Sampara Dg. Lili (1951-1952)

2. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957)

3. M. Junus Dg. Mile (1957-1959)

4. Latif Dg. Massikki (1959-1962)

5. H. Arupala (1962-1965)

6. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976)

7. Kol. Abustam (1976-1982)

8. Kol. Jancy Raib (1982-1988)

9. Kol. Suwahyo (1988-1993)

10. H. A. Malik B. Masry, SE, MS (1994-1999)
11. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH, M.Si (1999-2004)
12. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008)
13. Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.Si (2008 - 2009)
14. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 s/d Sekarang)

4.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar

a. Visi

Rumusan visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni **"Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat"** adalah bagian tidak terpisahkan/kelanjutan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2005-2010 yakni **"Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi"** sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara

kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka disusun

Visi 2014 :

"Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal".

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:

Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global.

Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.

Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, prilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu.

Kriteria pembangunan berkarakter yaitu Perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.

b. Misi

Penjabaran dari visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat;
2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;
3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis, dinamis, demokratis dan taat hukum.

4.1.5 Nilai-Nilai

Agar pembangunan kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah :

1. Kemerdekaan.

Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.

2. Kebersamaan.

Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang mendesain kekayaan keberagaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh kembangkan.

3. Saling Memanusiakan - Sipakatau.

Makassar adalah kota dimana hidup orang-orang yang secara individu dan sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena sadar sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.

4. Saling Menghargai - Sipakalebbi.

Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan kedudukan dalam masyarakat masing-masing.

5. Saling Mengingatkan - Sipakainge.

Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, lupa dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas batas nilai masyarakat beradab dan martabat.

6. Keterbukaan.

Agar proses pembangunan dapat menyertakan peranserta masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.

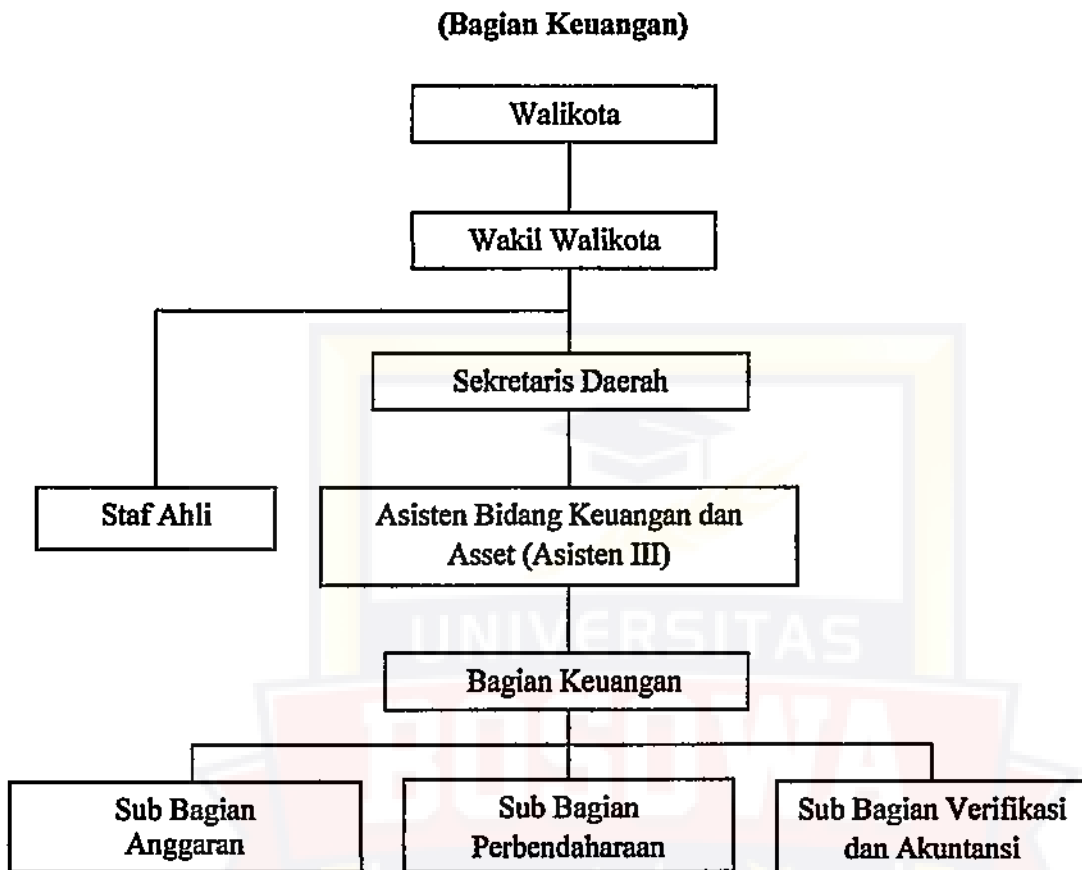
7. Semangat Kejuangan.

Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan "Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai".

4.1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Makassar (Bagian Keuangan)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar



Sumber Data : Olahan Dari Penjelasan Pejabat Bagian Keuangan Pemkot Makassar (2013)

4.1.7 Tugas dan Fungsi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama dan juga bahwa setiap organisasi memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan. Oleh karenanya, diperlukan struktur organisasi yang merupakan gambaran fungsi dan tugas masing-masing bidang dalam pencapaian tujuan organisasi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 peraturan ini, Asisten Bidang Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pengelolaan keuangan.
2. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dan pengkoordinasian petunjuk teknis penyusunan program analisa kebutuhan dan pengadaan dan aset daerah serta penyiapan administrasi perlengkapan.
3. Pengkoordinasian perangkat daerah berdasarkan pengelompokan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

e. Bagian Keuangan

1. Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina administrasi keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) peraturan ini, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan daerah;
 - Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan;

- Penyiapan bahan bimbingan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

f. Sub Bagian Anggaran

1. Sub bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD serta menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) peraturan ini, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - Menyusun rencana kerja Sub Bagian Anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mempersiapkan data/bahan penyusunan naskah Arah Kebijakan Umum APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Mempersiapkan bahan, data dan menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah;
 - Mempersiapkan data/bahan penyusunan naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), perubahan APBD dan nota keuangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

3. Mempersiapkan Keputusan Kepala daerah tentang Pengangkatan Pemegang Kas Daerah, Bendaharawan/Pemegang Kas beserta atasan langsungnya, bekerjasama dengan sub Bagian anggaran dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
4. Mempersiapkan penerbitan SP2D atas anggaran belanja administrasi umum, belanja operasional dan belanja modal serta daftar register SP2D;
5. Mengelola kartu dan daftar sesuai dengan contoh yang ditetapkan;
6. Membuat laporan bulanan realisasi anggaran belanja menurut pasal dan digit anggaran;
7. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan tata usaha Pemegang Kas/Bendaharawan;
8. Mempersiapkan data/bahan dalam rangka pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan;
9. Menyelenggarakan penatausahaan, mempersiapkan bahan, data dan dokumen yang diperlukan untuk penerimaan bagian, hak, sumbangan dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, bekerjasama dengan pemegang Kas Daerah
10. Menyelenggarakan tata usaha Bagian, melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga Bagian, Kesejahteraan Staf/Karyawan Bagian Keuangan dan urusan Rumah Tangga Bagian Keuangan lainnya;

11. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemegang Kas/Bendaharawan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Pemegang Kas/Bendaharawan;
12. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen kepemilikan Pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik daerah, badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Publik;
13. Meneliti dan mencatat gaji dan tunjangan lainnya termasuk honorarium, vakasi, upah dan sebagainya;
14. Meneliti daftar Tunjangan Keluarga (KP-4) yang diajukan oleh pemegang Kas/Bendaharawan unit kerja;
15. Meneliti Surat Setoran Pajak (SSP), surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Askes, Bapertarum sesuai daftar Gaji;
16. Mempersiapkan dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN;
17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan bidang tugasnya;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

h. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

1. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta melakukan

- pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) peraturan ini, Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Menyusun rencana kerja sub bagian Verifikasi dan Pembukuan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas;
 - Mempersiapkan data/bahan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang terdiri atas :
 - Laporan Perhitungan APBD (Laporan realisasi Anggaran);
 - Nota Perhitungan APBD/Catatan Laporan Keuangan;
 - Neraca Daerah;
 - Arus Kas (Cash Flow)
 - 3 Menyiapkan dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah dan Arus Kas Triwulanan dan Semesteran secara berkala untuk di sampaikan kepada DPRD dan instansi terkait lainnya;
 4. Melakukan Penjurnalan (peringkasan transaksi) anggaran dan realisasi yang berasal dari mutasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 5. Melakukan Posting ke Buku Besar terhadap transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta menyusun Neraca Saldo;
 6. Melaksanakan pencatatan aset yang di peroleh melalui APBD maupun aset yang diperoleh dalam bentuk bantuan, hibah, sumbangan;

7. Meneliti dan mengevaluasi Surat Perintah Membayar (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS) dan Buku Kas Umum dan Laporan-laporan Keuangan Daerah;
8. Meneliti dan melakukan evaluasi pelaksanaan APBD, melakukan koreksi/perbaikan (pengalihan dan pemindahan) serta transaksi terhadap pembebanan anggaran, mempersiapkan bahan/data untuk pembebanan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang sifatnya administratif melalui jurnal umum dan diterbitkan dalam bentuk Daftar Pembukuan Administratif (DPA)

4.2 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu organisasi publik juga wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang berisi gambaran tentang kondisi keuangan serta kinerja yang dicapainya pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legal lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

Dalam menganalisis kinerja keuangan sektor publik pada Pemerintah Daerah Kota Makassar, laporan keuangan yang disajikan selama empat tahun yaitu Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, dan 2011.

4.3 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara mutlak mengenai nama kaidah pengaturannya. Meskipun demikian, dalam rangka laporan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun pengakuntansian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan PEMDA tersebut terhadap PEMDA lainnya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:230).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang mutlak mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah antara lain (Halim, 2007:232-241).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Abdul Halim, 2007:232) sebagai berikut.

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Tabel 4.3
Perkembangan APBD Kota Makassar
Tahun Anggaran 2008-2011

NO	URAIAN	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	145.466.209.400	176.628.387.000	216.928.890.000	345.335.311.000
2	Dana Perimbangan	781.814.690.000	824.994.987.000	868.180.952.000	923.001.825.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	155.565.199.500	196.124.789.800	371.276.039.000	471.773.306.000
Jumlah Pendapatan		1.082.846.098.900	1.197.748.163.800	1.456.385.881.000	1.740.110.442.000

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Dengan data diatas dapat dihitung besarnya rasio kemandirian sebagai

berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2008} = \frac{\text{Rp. 145.466.209.400}}{\text{Rp. 781.814.690.000} + \text{Rp. 155.565.199.500}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2008} = 6,44 \%$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2009} = \frac{\text{Rp. 176.628.387.000}}{\text{Rp. 824.994.987.000} + \text{Rp. 196.124.789.800}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2009} = 5,78\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2010} = \frac{\text{Rp. 216.928.890.000}}{\text{Rp. 868.180.952.000} + \text{Rp. 371.276.039.000}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2010} = 5,71\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2011} = \frac{\text{Rp. 345.335.311.000}}{\text{Rp. 923.001.825.000} + \text{Rp. 471.773.306.000}}$$

$$\text{Rasio Kemandirian TA 2011} = 4,03\%$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah dan bahkan mempunyai kecenderungan turun. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat ataupun provinsi.

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100 % (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerahpun semakin baik).

Tabel 4.4
Biaya, Target, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran
2008-2009

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2008		ANGGARAN TAHUN 2009	
		Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pajak Daerah	92.453.530.000	98.318.693.736	115.213.922.000	115.223.338.976
2	Retribusi Daerah	40.463.128.400	40.966.229.794	44.281.324.000	39.980.839.820
	Jumlah	132.916.658.400	139.284.923.530	159.495.246.000	155.204.178.796
	Rasio efektivitas		1,04%		0,97%

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Tabel 4.5
Biaya, Target, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran
2010-2011

NO	KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN 2010		ANGGARAN TAHUN 2011	
		Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pajak Daerah	134.216.181.000	133.551.818.679	260.486.460.000	270.547.821.316
2	Retribusi Daerah	62.971.506.000	59.729.103.725	66.549.806.000	62.043.147.863
	Jumlah	197.187.687.000	193.280.922.404	327.036.266.000	332.590.969.179
	Rasio efektivitas		0,98%		1,01%

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Dari data tabel 4.4 dan 4.5 di atas diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun

2008 mencapai 1,04% sedangkan pada tahun 2009 hanya mencapai 0,97%, pada tahun 2010 mencapai 0,98% selanjutnya di tahun 2011 mencapai 1,01% Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memungut PAD-nya pada tahun 2009 dan tahun 2010 belum dikategorikan efektivitas, hal ini terlihat dari rasio yang dicapai masih kurang dari 1%. Hanya ditahun 2008 dan 2011 mencapai 1,04% dan 1,01%, maka pada tahun tersebut dikategorikan efektivitas karena rasionya mencapai 1%.

c. Rasio Aktivitas (Rasio Kecerasan)

q Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolak ukur yang pasti seberapa besar rasio belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik yang ideal, karena dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Berdasarkan tabel 4.6 rasio keserasian dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perkembangan Belanja dan APBD Kota Makassar
Tahun Anggaran 2008-2011

NO	URAIAN	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)
1	Belanja (APBD)	623.097.146.238	616.029.846.808	732.623.162.933	937.043.347.148
2	Belanja Operasional	527.116.004.935	574.126.173.031	678.343.932.314	872.261.848.703
3	Belanja Modal	162.989.216.608	197.180.578.338	176.732.080.204	168.523.776.058
4	Belanja Tak Terduga	-	-	751.300.000	2.025.601.360

Sumber Data : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

1. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2008 :

$$\begin{aligned}
 \text{- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 690.105.221.543}}{\text{Rp. 623.097.146.238}} \\
 &= 10,75\%
 \end{aligned}$$

2. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2009 :

$$\begin{aligned}
 \text{- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 771.306.751.369}}{\text{Rp. 616.029.846.808}} \\
 &= 25,20\%
 \end{aligned}$$

3. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2010 :

$$\begin{aligned}
 \text{- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 855.827.312.518}}{\text{Rp. 732.623.162.933}} \\
 &= 16,81\%
 \end{aligned}$$

4. Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD Tahun Anggaran 2011 :

$$\begin{aligned}
 \text{- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 1.042.811.226.121}}{\text{Rp. 937.043.347.148}} \\
 &= 11,28\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 690.105.221.543 atau 10,75% menjadi Rp 771.306.751.369 atau 25,20% pada Tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 855.827.312.518 atau 16,81%

menjadi Rp 1.042.811.226.121 atau 11,28%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah memprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja terhadap APBD relatif besar.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Formulasi untuk rasio pertumbuhan :

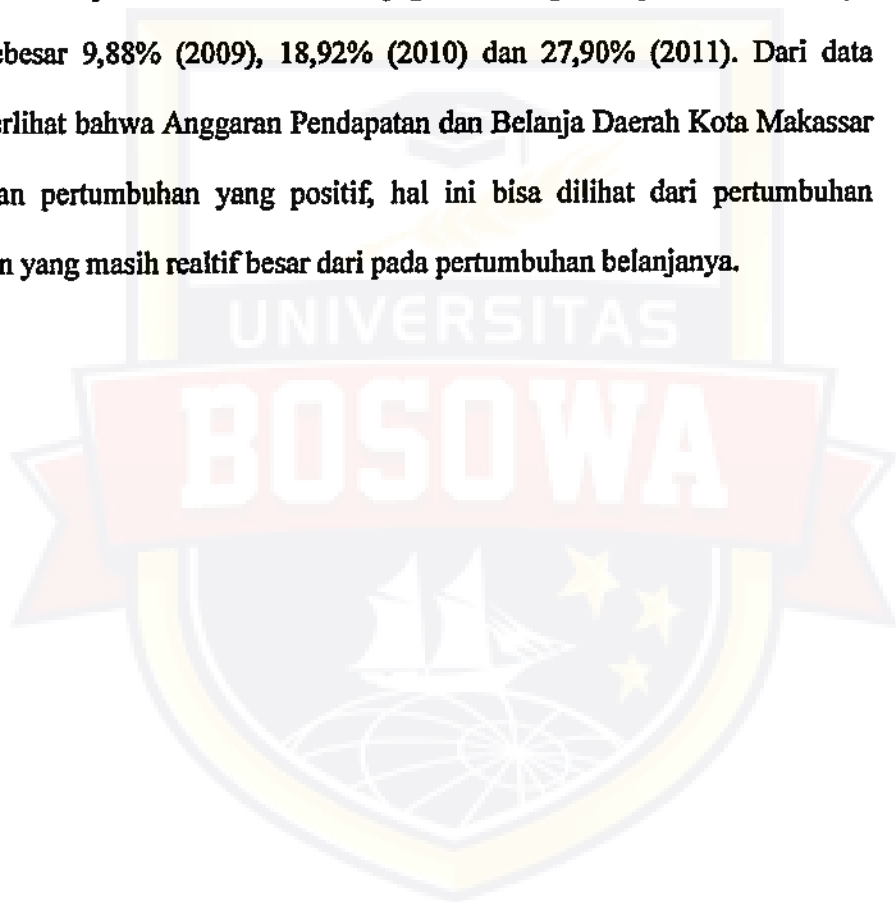
$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (akhir periode)}}{\text{Pendapatan/PAD/Belanja (periode sebelumnya)}} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Rasio Pertumbuhan APBD Kota Makassar
Tahun Anggaran 2008-2011

No	Keterangan	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	154.911.891.959	170.698.725.818	210.136.331.090	351.692.552.587
2	Pertumbuhan PAD	-	10,19%	23,10%	67,36%
3	Total Pendapatan	1.118.335.593.879	1.215.717.720.899	1.449.662.649.590	1.728.570.515.122
4	Pertumbuhan Pendapatan	-	8,70%	19,24%	19,23%
5	Belanja Rutin	623.097.146.238	616.029.846.808	732.623.162.933	937.043.347.148
6	Pertumbuhan Belanja Rutin	-	(9,88%)	18,92%	27,90%

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008-2011

Dari uraian rasio di atas, dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2008-2011 mengalami pertumbuhan, pendapatan tumbuh sebesar 8,70% pada tahun 2009, 19,24% pada tahun 2010 dan 19,23% pada tahun 2011 . Total pendapatan tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,19% (2009), 23,10% (2010) dan 65,36% (2011). Namun pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan bertumbuhnya belanja sebesar 9,88% (2009), 18,92% (2010) dan 27,90% (2011). Dari data tersebut terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif besar dari pada pertumbuhan belanjanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian Kota Makassar pada tahun 2008 sebesar 6,44% dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,66% dimana pada tahun 2008, tingkat kemandirian keuangan sebesar 6,44% dan pada tahun 2009 tingkat kemandirian keuangan sebesar 5,78%. Begitupun pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar 0,07% dimana pada tahun 2009 tingkat kemandirian keuangan 5,78% dan pada tahun 2010 sebesar 5,71% dan pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan sebesar 1,68, dimana pada tahun 2010 tingkat kemandirian keuangan 5,71% dan pada tahun 2011 tingkat kemandirian sebesar 4,03%.
2. Tingkat Efektivitas Pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2009 dan 2010 dikategorikan tidak efektivitas hal ini terlihat dari rasio yang dicapai hanya 0,97% pada tahun 2009 dan 0,98% di tahun 2010 (kurang dari 100%). Cuma di tahun 2008 dan 2011 dikategorikan efektivitas, hal ini terlihat dari rasionya yang mencapai 1,04% pada tahun 2008

dan 1,01% di tahun 2011, sehingga pada tahun tersebut dikategorikan efektivitas karena rasionya di atas 100%.

3. Terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 690.105.221.543 atau 10,75% menjadi Rp 771.306.751.369 atau 25,20% pada Tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 855.827.312.518 atau 16,81% menjadi Rp 1.042.811.226.121 atau 11,28%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah memprioritaskan untuk kebutuhan belanja sehingga rasio belanja terhadap APBD relatif besar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2008-2011 mengalami pertumbuhan, pendapatan tumbuh sebesar 8,70% pada tahun 2009, 19,24% pada tahun 2010 dan 19,23% pada tahun 2011 . Total pendapatan tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,19% (2009), 23,10% (2010) dan 65,36% (2011). Namun pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan bertumbuhnya belanja sebesar 9,88% (2009), 18,92% (2010) dan 27,90% (2011). Dari data tersebut terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih relatif besar dari pada pertumbuhan belanjanya.

5.2 Saran

Adapun yang dapat penulis sarankan setelah menganalisis dan menyimpulkan berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar yaitu :

1. Agar PAD Pemerintah Kota Makassar ditahun-tahun yang akan datang dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah, maka efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD harus ditingkatkan.
2. Agar tingkat Efektivitas daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan haruslah sesuai dengan potensi riil daerah yang dimiliki.
3. Tingkat Rasio Pertumbuhan Kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari rasio pertumbuhannya dari empat tahun terakhir, sehingga di tahun-tahun akan datang agar lebih dapat meningkatkan lagi keberhasilan yang telah dicapai.
4. Pemerintah Kota Makassar dimasa-masa yang akan datang sebaiknya melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan analisis-analisis yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Tujuan analisis laporan keuangan diharapkan dapat membantu pihak manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan pembangunan dimasa yang akan datang, meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus mengukur kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung, 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010)*. Cetakan Kesatu, Alfabeta, cv, Bandung.

....., 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*. Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat Jakarta.

Abdul Halim. Muhammad Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Irham Fahmi, 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan Kesatu. Alfabeta, cv, Bandung.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. ANDI, Yogyakarta.

Muindro Renyowijoyo, 2013. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba*, Edisi Tiga. Mitra Wacana Media, Jakarta.

....., 2013. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba (PP No. 71 Tahun 2010)*. Edisi Tiga. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sahrul Hi. Posi, 2011. *Analisis Rasio (Kutipan Skripsi Akuntansi Sektor Publik Tahun 2011)*, Makassar

Sofian Syafri Harahap, 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

www.makassar.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TA. 2008-2011)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
NERACA KONVERSI BERDASARKAN SAP
PER 31 DESEMBER 2009 DAN PER 31 DESEMBER 2008

NO.	ASET	2009 (Rp)	2008 (Rp)	NO.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2009 (Rp)	2008 (Rp)
I.	ASET			II.	KEWAJIBAN		
1.	ASET LANCAR			1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	a. Kas di Kas Daerah	82.521.826,906,36	112.313.681.832,58		a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	3.681.105.823,00	3.149.494.966,00		b. Utang Belanja	2.693.004.242,00	38.912.300,00
	c. Kas di Bendahara Penerima	1.207.909.382,00	305.718.540,00		c. Utang Bunga	31.665.963.444,51	28.954.245.440,85
	d. Piutang Pajak Daerah	3.800.910.694,00	3.800.910.694,00		d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	35.837.399.490,60	33.602.452.548,11
	e. Piutang Retribusi	373.672.000,00	0,00		e. Utang Pajak	908.630.478	1.050.181.189,00
	f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00		f. Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	g. Piutang Bagi Hasil Pusat dan Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00		g. Utang Kepada Pemerintah Lainya	59.147.869.570,29	61.364.676.909,16
	h. Piutang Lainnya	4.094.992.725,00	1.087.183.972,18		JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK	130.252.867.225,60	125.010.468.387,12
	i. Piutang Deviden	96.023.711,74	0,00				
	j. Persediaan	4.062.781.144,00	4.124.481.017,00				
	JUMLAH ASET LANCAR	99.743.222.386,10	124.781.471.021,76		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.	INVESTASI JANGKA PANJANG				a. Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		
	a. Investasi Non Permanen				- Depkeu RDA-115/DP3/1993 (P3KT/EX	2.397.643.200,00	2.797.250.783,60
	1) Penyertaan Modal dalam bentuk saham	0,00	0,00		IBRD Loan No. 3340-IND)		
	2) Dana Bergulir	0,00	2.000.000.000,00		- Depkeu SLA.833/DP3/1995 Tgl 19	0,00	1.435.733.748,34
	3) Pinjaman Modal	2.033.517.400,00	0,00		Nopember 1995/(Prasuruga Air Bersih		
	Jumlah Investasi Non Permanen	2.033.517.400,00	2.000.000.000,00		(Ex OECF Loan No. IP-415)	0,00	0,00
	b. Investasi Permanen				- SLA.12/009/IBRD/PP Bank Dunia		
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	327.422.927.649,15	326.672.927.649,15		Urhan III (Ex LOAN IBRD No. 1653-IND)		
	- Penyertaan Modal Dalam Bentuk Saham	26.457.382.300,00	26.457.382.300,00		Tgl 31-1-1979		
	Jumlah Investasi Permanen	353.880.309.949,15	353.130.309.949,15		b. Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00
					c. Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JK PANJANG	355.913.827.349,15	355.130.309.949,15		JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG	2.397.643.200,00	4.232.984.531,94
					JUMLAH KEWAJIBAN	132.650.510.425,60	129.243.452.919,06

NO.	ASET	2009	2008	NO.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2009	2008	
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	
3	ASET TETAP			III.	EKUITAS DANA			
	a. Tanah	2.855.553,038,077.00	3.792.246,279,650.00		1.	EKUITAS DANA LANCAR		
	b. Peralatan dan Mesin	307,379,155,615.00	224,577,855,146.40		a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	85,294,302,251.36	114,412,995,609.58
	c. Gedung dan Bangunan	395,008,771,844.00	470,929,567,328.39		b.	Pendapatan yang Dianggarkan	1,207,909,382.00	305,718,540.00
	d. Jalan, Irigasi dan Jembatan	3,270,909,465,673.00	628,282,414,548.53		c.	Cadangan Piutang	8,269,599,130.74	4,888,094,666.18
	e. Aset Tetap Lainnya	17,943,659,943.00	11,046,056,839.88		d.	Cadangan Persediaan	4,062,781,144.00	4,124,481,017.00
	f. Kontribusi Dalam Pengelolaan	40,785,345,703.00	42,798,473,366.67		e.	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(129,344,236,747.60)	(123,960,287,198.12)
	g. Akumulasi Penyusutan	(2,735,138,838.52)	0.00			JUNTAH EKUITAS DANA LANCAR	(30,509,644,839.50)	(228,997,365.36)
	JUNTAH ASET TETAP	6,884,844,298,016.48	5,169,880,646,879.87					
	4	DANA CADANGAN				2	EKUITAS DANA INVESTASI	
a. Dana Cadangan		0.00	0.00	a.	Dihinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang		355,913,827,349.15	355,130,309,949.15
	JUNTAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	b.	Dihinvestasikan dalam Aset Tetap	6,884,844,298,016.48	5,169,880,646,879.87	
5	ASET LAINNYA			c.	Dihinvestasikan dalam Aset Lainnya	43,518,128,341.06	43,460,609,866.06	
	a. Tagihan Penjualan Angsuran	101,180,000.00	136,130,000.00	d.	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(2,397,643,200.00)	(4,232,984,531.94)	
	b. Tunjutan Ganti Rugi	0.00	0.00		JUNTAH EKUITAS DANA INVESTASI	7,281,878,610,506.69	5,564,238,582,163.14	
	c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	3	EKUITAS DANA CADANGAN			
	d. Aset Tak Bervujud	0.00	0.00		a.	Dihinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
	JUNTAH ASET LAINNYA	43,518,128,341.06	43,460,609,866.06		JUNTAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00	
					JUNTAH EKUITAS DANA	7,251,368,965,667.19	5,564,009,584,797.78	
	TOTAL ASET	7,384,019,476,092.79	5,693,253,037,716.84		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7,384,019,476,092.79	5,693,253,037,716.84	

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)		%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,082,846,098,900.00	1,118,335,593,879.39	35,489,494,979.39		103.28
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,466,209,400.00	154,911,891,959.39	9,445,682,559.39		106.49
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	92,453,530,000.00	98,318,693,736.00	5,865,163,736.00		106.34
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	40,463,128,400.00	40,966,229,794.00	503,101,394.00		101.24
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	4,313,657,000.00	4,357,505,688.22	43,848,688.22		101.02
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,235,894,000.00	11,269,462,741.17	3,033,568,741.17		136.83
4.2	DANA PERIMBANGAN	781,814,690,000.00	789,251,884,195.00	7,437,194,195.00		100.95
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	118,493,300,000.00	125,930,492,195.00	7,437,192,195.00		106.28
4.2.2	Dana Alokasi Umum	643,328,390,000.00	643,328,392,000.00	2,000.00		100.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	19,993,000,000.00	19,993,000,000.00	0.00		100.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155,565,199,500.00	174,171,817,725.00	18,606,618,225.00		111.96
4.3.1	Hibah	0.00	3,087,582,000.00	3,087,582,000.00		100.00
4.3.2	Dana Darurat	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		100.00
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	115,000,000,000.00	128,139,956,935.00	13,139,956,935.00		111.43
4.3.4	Dana Penyusutan dan Otonomi Khusus	5,272,789,600.00	5,272,789,600.00	0.00		100.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	35,292,409,900.00	34,671,489,190.00	(620,920,710.00)		98.24
5	JUMLAH PENDAPATAN	1,082,846,098,900.00	1,118,335,593,879.39	35,489,494,979.39		103.28
5	BELANJA DAERAH	1,190,998,157,900.00	1,117,277,477,710.75	(73,720,680,189.25)		93.81
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	667,004,394,900.00	623,097,146,238.00	(43,907,248,662.00)		93.42
5.1.1	Belanja Pegawai	558,188,627,000.00	527,116,004,935.00	(31,072,622,065.00)		94.43
5.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.3	Belanja Subsidi	1,850,000,000.00	1,728,066,825.00	(121,933,175.00)		93.41
5.1.4	Belanja Hibah	73,745,967,900.00	61,598,935,217.00	(12,147,032,683.00)		83.53
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	33,219,800,000.00	32,654,139,261.00	(565,660,739.00)		98.30
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00		0.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00		0.00

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
5.2	BELANJA LANGSUNG	523,993,763,000.00	494,180,331,472.75	(29,813,431,527.25)	94.31
5.2.1	Belanja Pegawai	104,031,432,441.00	95,017,920,754.00	(9,033,511,687.00)	91.32
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249,038,892,973.00	236,173,194,110.75	(12,865,698,862.25)	94.83
5.2.3	Belanja Modal	170,903,437,586.00	162,989,216,608.00	(7,914,220,978.00)	95.37
	JUMLAH BELANJA	1,190,998,157,900.00	1,117,277,477,710.75	(73,720,680,189.25)	93.81
	SURPLUS / (DEFISIT)	(108,152,059,000.00)	1,058,116,168.64	109,210,175,168.64	(0.98)
6	PENBIAYAAN	108,152,059,000.00	113,354,879,440.94	5,202,820,440.94	104.81
6.1	PENERIMAAN PENBIAYAAN	109,157,059,000.00	114,354,879,440.94	5,202,820,440.94	104.77
6.1.1	Sisa Lebih Penulungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	101,652,059,000.00	101,586,269,346.94	(65,789,653.06)	99.94
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	100.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	87,900,860.00	87,900,860.00	100.00
6.1.7	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	0.00	5,180,709,234.00	5,180,709,234.00	100.00
	JUMLAH PENERIMAAN PENBIAYAAN	109,152,059,000.00	114,354,879,440.94	5,202,820,440.94	104.77
6.2	PENGELUARAN PENBIAYAAN	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal Investasi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Investasi Non Permuan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00
	JUMLAH PENGELUARAN PENBIAYAAN	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETO	108,152,059,000.00	113,354,879,440.94	5,202,820,440.94	104.81
	SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGGARAN	108,152,059,000.00	114,412,995,609.58	114,412,995,609.58	100.00

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.197.748,163,800,00	1.215.717,720,899,79	17.969,557,099,79	101,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176,628,387,000,00	170,698,725,818,79	(5,929,661,181,21)	96,64
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115,213,922,000,00	115,223,338,976,00	9,416,976,00	100,01
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44,281,324,000,00	39,980,839,820,00	(4,300,484,180,00)	90,29
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5,946,057,000,00	5,665,752,809,23	(280,304,190,77)	95,29
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,187,084,000,00	9,828,794,213,56	(1,358,289,786,44)	87,86
4.2	DANA PERIMBANGAN	824,994,987,000,00	833,834,215,606,00	8,839,228,606,00	101,07
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	134,544,283,000,00	143,383,511,606,00	8,839,228,606,00	106,57
4.2.2	Dana Alokasi Umum	647,299,704,000,00	647,299,704,000,00	-	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	43,151,000,000,00	43,151,000,000,00	-	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	196,124,789,800,00	211,184,779,475,00	15,059,989,675,00	107,68
4.3.1	Hibah	651,006,000,00	1,559,018,800,00	908,012,800,00	100,00
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	100,00
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	121,500,000,000,00	115,012,318,875,00	(6,487,681,125,00)	94,66
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49,180,487,000,00	68,965,037,000,00	19,784,550,000,00	140,23
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	24,793,296,800,00	25,648,404,800,00	855,108,000,00	103,45
5	JUMLAH PENDAPATAN	1.197.748,163,800,00	1.215.717,720,899,79	17.969,557,099,79	101,50
5	BELANJA DAERAH	1.306,673,105,316,00	1.241,043,268,652,01	(65,629,836,663,99)	94,98
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	649,337,695,000,00	616,029,846,808,01	(33,307,848,191,99)	94,87
5.1.1	Belanja Pegawai	596,126,803,000,00	574,126,173,031,00	(22,000,629,969,00)	96,31
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	1,500,000,000,00	1,125,000,000,00	(375,000,000,00)	75,00
5.1.4	Belanja Hibah	24,963,300,000,00	23,304,715,000,00	(1,658,585,000,00)	93,36
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	26,747,592,000,00	17,473,958,777,01	(9,273,633,222,99)	65,33
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	%
5.2	BELANJA LANGSUNG				
5.2.1	Belanja Pegawai	657.335,410,316.00	625,013,421,844.00	(32,321,988,472.00)	95.08
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136,372,871,403.00	126,383,772,185.00	(9,989,099,218.00)	92.68
5.2.3	Belanja Modal	311,536,842,011.00	301,449,071,321.00	(10,087,770,690.00)	96.76
		209,425,696,902.00	197,180,578,338.00	(12,245,118,564.00)	94.15
	JUMLAH BELANJA	1,306,673,105,316.00	1,241,043,268,652.01	(65,629,836,663.99)	94.98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(108,924,941,516.00)	(25,325,547,752.22)	83,599,393,763.78	23.25
6	PENBIAYAAN	108,924,941,516.00	110,619,850,003.58	1,666,766,819.58	101.56
6.1	PENERIMAAN PENBIAYAAN	115,135,546,000.00	116,802,312,819.58	1,666,766,819.58	101.45
6.1.1	Sisa Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	114,412,995,000.00	114,396,987,634.58	(16,007,365.42)	99.98
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	-	692,283,100.00	(30,267,900.00)	-
6.1.6	Penerimaan Platung Daerah	722,551,000.00	1,713,042,085.00	1,713,042,085.00	100.00
6.1.7	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PENBIAYAAN	115,135,546,000.00	116,802,312,819.58	1,666,766,819.58	101.45
6.2	PENGELUARAN PENBIAYAAN	6,210,604,484.00	6,182,462,816.00	(28,141,668.00)	99.55
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Pembayaran Modal Investasi Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Uang	5,210,604,484.00	5,182,462,816.00	(28,141,668.00)	99.45
6.2.4	Pembertian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Investasi Non Permanen	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PENBIAYAAN	6,210,604,484.00	6,182,462,816.00	(28,141,668.00)	99.55
	PEMBIAYAAN NETO	108,924,941,516.00	110,619,850,003.58	1,694,908,487.58	101.55
	SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGGARAN	108,924,941,516.00	85,294,302,251.36	85,294,302,251.36	100.00

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar

NO.	ASET	2011	2010	NO.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2011	2010
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)
3	ASET TETAP			III.	EKUITAS DANA		
	a. Tanah	3.486.384.924,150,00	3.479.992.063,750,00		1. EKUITAS DANA LANGCAR		
	b. Peralatan dan Mesin	415.576.272,909,00	364,126,398,418,00		a. Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)	161,897,507,283,75	146,925,801,890,01
	c. Gedung dan Bangunan	656.801,066,951,00	656,566,566,951,00		b. Pendapatan yang Diunggulkan	112,564,089,62	176,765,195,00
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.375,960,820,889,00	3.375,950,670,889,00		c. Cadangan Piutang	16,480,099,018,38	11,394,032,203,50
	e. Aset Tetap Lainnya	38,325,391,187,00	22,953,460,457,00		d. Cadangan Persediaan	13,227,212,634,64	8,759,448,697,013,14
	f. Kontribusi Dalam Pengertjan	147,958,004,240,00	52,620,851,203,00		e. Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(118,360,640,293,56)	(115,468,697,013,14)
	JUMLAH ASET TETAP	8,106,393,941,263,34	7,937,597,372,605,34		JUMLAH EKUITAS DANA LANGCAR	73,356,742,732,83	51,787,350,474,06
4	DANA CADANGAN			2.	EKUITAS DANA INVESTASI		
	a. Dana Cadangan	-	-		a. Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang	349,889,700,535,15	349,403,067,035,15
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	8,106,393,841,263,34	7,937,597,372,605,34	
5	ASET LAINNYA			c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	182,798,519,628,54	179,352,553,590,54	
	a. Tagihan Penjualan Aneksuran	387,286,350,00	61,690,000,00	d. Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(399,607,729,66)	1,198,823,188,98)	
	b. Tuntutan Ganti Rugi	-	-				
	c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	173,325,179,315,00	173,325,179,315,00	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	8,638,682,453,697,37	8,465,154,170,042,05	
	d. Aset Tak Berwujud	8,420,948,150,00	5,298,808,150,00	EKUITAS DANA CADANGAN			
	JUMLAH ASET LAINNYA	182,798,519,628,54	179,352,553,590,54	a. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	
				JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	
				JUMLAH EKUITAS DANA	8,712,039,196,430,20	8,516,941,520,561,11	
				TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8,831,488,948,246,92	8,634,479,108,039,23	

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG		%
				(Rp)	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.456.385.881.000,00	1.449.662.649.590,85	(6.723.231.409,15)		99,54
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	216.928.890.000,00	210.136.331.090,64	(6.792.558.909,36)		96,86
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	134.216.181.000,00	133.551.818.679,00	(664.362.321,00)		99,51
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	62.971.506.000,00	59.729.103.725,43	(3.242.402.274,57)		94,84
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	6.124.203.000,00	5.817.813.865,99	(306.389.134,01)		94,99
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.617.000.000,00	11.037.594.820,22	(2.579.405.179,78)		81,05
4.2	DANA PERIMBANGAN	868.180.952.000,00	861.280.547.227,00	(6.900.404.773,00)		99,20
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	178.160.825.000,00	171.260.420.227,00	(6.900.404.773,00)		96,12
4.2.2	Dana Alokasi Umum	644.266.427.000,00	644.266.427.000,00	-		100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	45.753.700.000,00	45.753.700.000,00	-		100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	371.276.039.000,00	378.245.771.273,21	6.969.732.273,21		101,88
4.3.1	Hibah	-	650.445.600,00	650.445.600,00		100,00
4.3.2	Dana Darurat	100.000.000,00	100.000.000,00	-		100,00
4.3.3	Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	148.066.788.000,00	155.704.122.541,21	7.637.334.541,21		105,15
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.744.564.000,00	190.426.514.332,00	(1.318.049.668,00)		99,31
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	31.364.687.000,00	31.364.688.800,00	1.800,00		100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.385.881.000,00	1.449.662.649.590,85	(6.723.231.409,15)		99,54
5	BELANJA DAERAH	1.528.183.905.000,00	1.378.034.454.996,17	(150.149.450.003,83)		90,17
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	818.389.529.000,00	732.623.162.933,67	(85.766.366.066,33)		89,52
5.1.1	Belanja Pegawai	755.195.291.000,00	678.343.932.314,00	(76.851.358.686,00)		89,82
5.1.2	Belanja Bunga	8.446.484.000,00	2.119.727.019,67	(6.326.756.980,33)		25,09
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-		-
5.1.4	Belanja Hibah	26.913.300.000,00	25.175.607.000,00	(1.737.693.000,00)		93,54
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.082.454.000,00	26.232.596.600,00	(849.857.400,00)		96,86
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-		-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-		-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	752.000.000,00	751.300.000,00	(700.000,00)		99,90

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
5.2	BELANJA LANGSUNG	709.794.376.000,00	645.411.292.062,50	(64.383.083.937,50)	90,93
5.2.1	Belanja Pegawai	152.978.747.107,00	139.261.995.930,00	(13.716.751.177,00)	91,03
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.946.352.526,00	329.417.215.928,50	(19.529.136.597,50)	94,40
5.2.3	Belanja Modal	207.869.276.367,00	176.732.080.204,00	(31.137.196.163,00)	85,01
	JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)	1.528.183.905.000,00 (71.798.024.000,00)	1.378.034.454.996,17 71.628.194.594,68	(150.149.450.003,83) 143.426.218.594,68	90,17 (99,76)
6	PEMBIAYAAN	71.798.024.000,00	75.297.607.295,33	(304.589.248,64)	104,87
6.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.351.916.000,00	85.047.326.751,36	(304.589.248,64)	99,64
6.1.2	Sisa Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	85.294.302.000,00	84.951.389.751,36	(342.912.248,64)	99,60
6.1.3	Pencurian Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.7	Penerimaan Piutang Daerah	57.614.000,00	95.937.000,00	38.323.000,00	166,52
	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.351.916.000,00	85.047.326.751,36	(304.589.248,64)	99,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.553.892.000,00	9.749.719.456,03	(3.804.172.543,97)	71,93
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyerahan Modal Investasi Daerah	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	-	100,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	11.693.892.000,00	7.889.719.456,03	(3.804.172.543,97)	67,46
6.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.553.892.000,00	9.749.719.456,03	(3.804.172.543,97)	71,93
	PEMBIAYAAN NETO	71.798.024.000,00	75.297.607.295,33	3.499.583.295,33	104,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		146.925.801.890,01	146.925.801.890,01	100,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG		%
				(Rp)	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.740.110.442.000,00	1.728.570.515.122,97	(11.539.926.877,03)		99,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.335.311.000,00	351.692.552.587,60	6.357.241.587,60		101,84
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	260.486.460.000,00	270.547.821.316,00	10.061.361.316,00		103,86
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	66.549.806.000,00	62.043.147.863,00	(4.506.658.137,00)		93,22
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	6.391.525.000,00	6.355.200.147,60	(36.324.852,40)		99,43
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.907.520.000,00	12.746.383.261,00	838.863.261,00		107,04
4.2	DANA PERIMBANGAN	923.001.825.000,00	905.873.927.525,00	(17.127.897.475,00)		98,13
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	143.622.386.000,00	126.494.607.525,00	(17.127.778.475,00)		88,06
4.2.2	Dana Alokasi Umum	718.481.339.000,00	718.481.320.000,00	(19.000,00)		100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.898.100.000,00	60.898.000.000,00	(100.000,00)		99,99
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	471.773.306.000,00	471.004.035.010,37	(769.270.989,63)		98,84
4.3.1	Hibah	1.650.000.000,00	970.971.485,00	(679.028.515,00)		58,85
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-		-
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	167.338.118.000,00	166.494.273.845,37	(843.844.154,63)		99,49
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	262.313.899.000,00	262.927.499.880,00	613.600.880,00		100,23
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	40.471.289.000,00	40.611.289.800,00	140.000.800,00		100,34
5	JUMLAH PENDAPATAN	1.740.110.442.000,00	1.728.570.515.122,97	(11.539.926.877,03)		99,33
5.1	BELANJA DAERAH	1.876.044.800.000,00	1.711.878.129.986,23	(164.166.670.013,77)		91,25
5.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	973.598.127.000,00	937.043.347.148,00	(36.554.779.852,00)		96,24
5.1.1.1	Belanja Pegawai	899.108.673.000,00	872.261.848.703,00	(26.846.824.297,00)		97,01
5.1.1.2	Belanja Bunga	5.935.484.000,00	-	(5.935.484.000,00)		-
5.1.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-		-
5.1.1.4	Belanja Hibah	39.311.651.000,00	35.577.984.849,00	(3.733.666.151,00)		90,50
5.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.216.717.000,00	27.177.912.236,00	(38.804.764,00)		99,85
5.1.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-		-
5.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-		-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.025.602.000,00	2.025.601.360,00	(640,00)		99,99

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
5.2	BELANJA LANGSUNG	902.446.673.000,00	774.834.782.838,23	(127.611.890.161,77)	85,85
5.2.1	Belanja Pegawai	212.685.490.323,00	199.815.388.838,94	(12.870.101.484,06)	93,94
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	439.839.972.419,00	406.495.617.941,29	(33.344.354.477,71)	92,41
5.2.3	Belanja Modal	249.921.210.258,00	168.523.776.058,00	(81.397.434.200,00)	67,42
	JUMLAH BELANJA	1.876.044.800.000,00	1.711.878.129.986,23	(164.166.670.013,77)	91,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	(135.934.358.000,00)	16.692.385.136,74	152.626.743.136,74	(12,28)
6	PEMBIAYAAN	135.934.358.000,00	145.185.667.247,01	143.612.490,01	106,81
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.975.801.000,00	147.119.413.490,01	143.612.490,01	100,09
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	146.975.801.000,00	146.906.346.990,01	(19.454.009,99)	99,98
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pinltag Daerah	50.000.000,00	213.066.500,00	163.066.500,00	426,13
6.1.7	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.975.801.000,00	147.119.413.490,01	143.612.490,01	100,10
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.041.443.000,00	1.933.746.243,00	(9.107.696.757,00)	17,51
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Pembayaran Modal Investasi Daerah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	10.991.443.000,00	1.933.746.243,00	(9.057.696.757,00)	17,59
6.2.4	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Investasi Non Peranan	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.041.443.000,00	1.933.746.243,00	(9.107.696.757,00)	17,51
	PEMBIAYAAN NETO	135.934.358.000,00	145.185.667.247,01	9.251.309.247,01	106,80
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		161.878.052.383,75	161.878.052.383,75	100,00

Sumber Data: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar